

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	<b>iii</b>
DAFTAR TABEL.....	<b>v</b>
DAFTAR GAMBAR .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	3
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....</b>	<b>5</b>
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	5
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.....</b>	<b>15</b>
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN.....	15
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan .....	16
3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu .....	17
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>18</b>
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan Untuk Tahun 2023 .....	19
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.....	23
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>	<b>25</b>
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja .....	25
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	28
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....</b>	<b>34</b>
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.....	35
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.....	35
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....</b>	<b>36</b>
7.1. Permasalahan Pembangunan Daerah .....	36
7.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	37



7.3.	Prioritas Pembangunan Tahun 2023 .....	38
7.4.	Indikator Pembangunan Tahun 2023 .....	45
7.5.	Program Prioritas Tahun 2023.....	51
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>.....</b>	<b>60</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 <u>PDRB Seri 2021 ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021</u> .....	7
Tabel 3.1 <u>Asumsi Makro RAPBN 2021 dan 2023</u> .....	16
Tabel 3.2 <u>Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023</u> .....	17
Tabel 3.3 <u>Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023</u> .....	17
Tabel 4. 1 <u>Proyeksi Target Pendapatan Daerah Pada Tahun Anggaran 2023</u> .....	24
Tabel 5.1 <u>Proporsi Anggaran Belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2023</u>	27
Tabel 5.2 <u>Proporsi Anggaran Belanja Operasi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2023</u>	29
Tabel 5.3. <u>Proporsi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023</u> .....	31
Tabel 5.4 <u>Proporsi Anggaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023</u> .....	32
Tabel 5.5. <u>Proporsi Anggaran Belanja Transfer Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2023</u>	33
Tabel 6.1 <u>Proporsi Anggaran Belanja pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2023</u> .....	34
Tabel 7.1. <u>Tujuan dan Sasaran Pembangunan</u> .....	37
Tabel 7.2. <u>Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten</u> .....	44
Tabel 7.3. <u>Indikator Makro Daerah Kabupaten Tanah bumbu tahun 2023</u> .....	45
Tabel 7.4. <u>Indikator Misi Daerah</u> .....	46
Tabel 7.5. <u>Program Proiritas Tahun 2023</u> .....	51



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu  
Tahun 2016-2020 ..... 8

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Pelaksanaan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dalam aspek peluang usaha, kenaikan pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambil kebijakan, berdaya saing dan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pembangunan daerah yang baik didasarkan pada perencanaan yang bertumpu pada prioritas pembangunan berbasis inspirasi masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023. RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, atas bawah dan bawah-atas (top-down/bottom-up) melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk Tahun Anggaran 2023 serta strategi pencapaiannya; (d) Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah serta strategi pencapaiannya; (e) Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

KUA Tahun Anggaran 2023 ini nantinya menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS Tahun Anggaran 2023. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi pedoman penyusunan APBD, sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, disebutkan bahwa Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).**

Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023, untuk:

- a. Menyediakan informasi makro tentang asumsi makro ekonomi daerah dan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan di tahun Anggaran 2023;
- b. Menyediakan pedoman dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023;
- c. Memastikan keterpaduan program nasional dan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah;

- d. Melakukan optimalisasi pelaksanaan anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah;
- e. Memantapkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).**

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- 10) Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
- 12) Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 62 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023.



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Pembangunan di bidang ekonomi diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan yang bermuara pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat didahului dengan dibangunnya pondasi yang kuat sehingga tercipta kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan memungkinkan adanya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat.

Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah ditentukan oleh keselarasan kebijakan Pemerintah Pusat, Regional serta Daerah dengan tetap bertumpu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi dan potensi serta permasalahan- permasalahan yang berkembang di daerah.

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat Tahun 2023 yang mengusung tema "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan didukung 7 prioritas Nasional yaitu:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam hal kesehatan dan pendidikan.
3. Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi hijau.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar.

Selain memperhatikan arah Kebijakan ekonomi nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 juga menyelaraskan dengan target Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 yang diproyeksikan akan kembali dapat tumbuh optimis.

Dengan mempertimbangkan beberapa hal tersebut, maka perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu dapat diproyeksi sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Sasaran Makro Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

<b>INDIKATOR</b>	<b>RPJMD TAHUN 2021-2026</b>	<b>RKPD TAHUN 2023</b>
Pertumbuhan Ekonomi	4,51 – 5,00	4,51-5,00
Inflasi	2,62	1,67
Kemiskinan	3,93 - 3,87	4,18 – 4,04
TPT	5,34 - 5,20	5,87 – 5,66
IPM	73,70 – 74,38	72,21 – 72,57

Sumber : Bappedalitbang Tanah Bumbu, Tahun 2023

### **2.1.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023**

#### **A. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi**

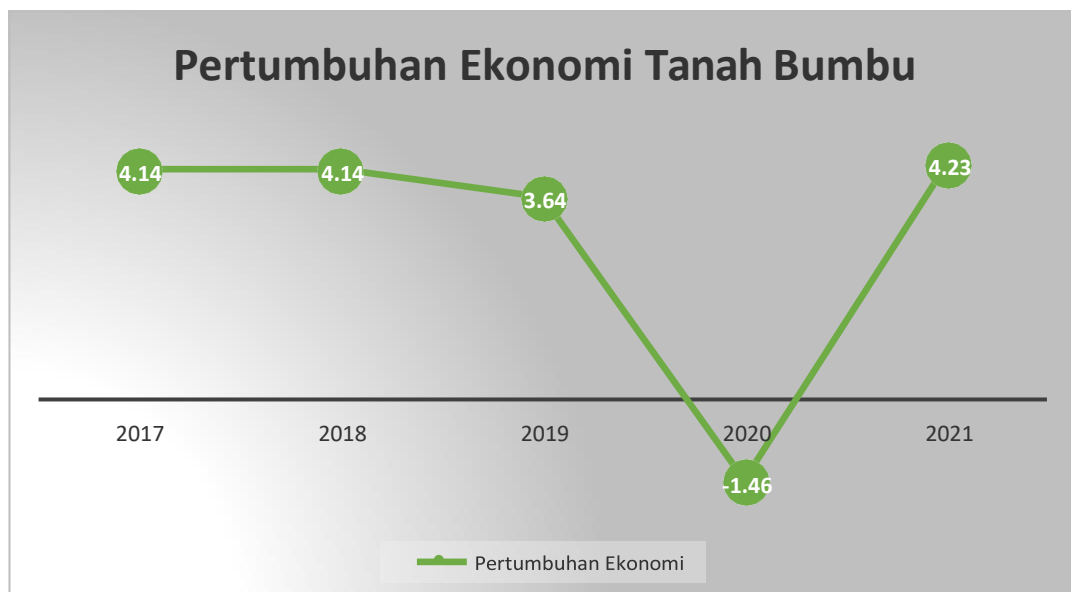
PDRB merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu daerah baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi..

Kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang menunjukkan trend yang semakin meningkat dari tahun ke tahun kecuali di tahun 2020. namun kondisi ini mengalami peningkatan yang cukup baik pada tahun 2021. Secara nominal nilai PDRB Kabupaten Tanah Bumbu Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 21,67 trilyun rupiah pada tahun 2021 lebih besar di

bandingkan dengan capaian tahun 2020 yang hanya 19,89 trilyun rupiah. Sedangkan PDRB atas Dasar Harga Konstan juga mengalami peningkatan dari 15,04 trilyun ditahun 2020 menjadi 16,40 trilyun ditahun 2021.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu dari tahun 2017-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah  
Bumbu Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu, 2022.

Secara umum, pertumbuhan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tidak lepas dari keadaan perekonomian provinsi, nasional maupun perekonomian global. Kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 diprediksi tumbuh lebih cepat dibandingkan tahun 2022.

Tabel 2.2  
PDRB Seri 2010 ADHB dan ADHK  
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021

Kategori	Uraian	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,596,188	2,601,039
B	Pertambangan dan Penggalian	7,311,515	6,413,414
C	Industri Pengolahan	2,242,607	1,411,031

D	Pengadaan Listrik, Gas	12,687	7,403
E	Pengadaan Air	25,117	17,365
F	Konstruksi	1,368,541	911,610
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,688,681	1,057,440
H	Transportasi dan Pergudangan	1,371,757	913,103
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,240	138,450
J	Informasi dan Komunikasi	815,921	620,364
K	Jasa Keuangan	395,672	243,532
L	Real Estate	497,765	350,215
M,N	Jasa Perusahaan	66,255	40,199
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	714,752	435,227
P	Jasa Pendidikan	916,762	602,110
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	257,949	166,225
R,S,T,U	Jasa lainnya	190,567	118,267
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>21,675,982</b>	<b>16,047,001</b>

Sumber: BPS Kabupaten Tanah Bumbu

Pertumbuhan ekonomi yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sector. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar pada PDRB Tanah Bumbu, yaitu mencapai 33,73 persen atau sebesar 7,31 triliun rupiah pada tahun 2021. Mulai membaiknya pertumbuhan di sektor pertambangan dan penggalian karena meningkatnya produksi batubara yang dipicu oleh kegiatan ekonomi dunia yang mulai membaik seperti kebutuhan batu bara di China yang mengalami kenaikan seiring dengan adanya pemulihan industry yang kembali dimulai pada tahun 2021 ini.

Sektor yang mempunyai kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi Tanah Bumbu adalah sector pertanian,

kehutanan dan perikanan dimana kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Tanah Bumbu atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 3,60 triliun rupiah atau sebesar 16,59 persen.

Disamping sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor lain yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhannya perekonomian Tanah Bumbu adalah sektor industri pengolahan yang didominasi oleh industri pengolahan CPO. Hal ini terjadi karena sejak awal tahun 2021 harga minyak sawit mentah (CPO) menemukan ritmenya kembali.

Per januari tahun 2021 harga rata-rata CPO mencapai US\$ 1.033,50 per metrik ton. Harga ini merupakan harga tertinggi sejak delapan tahun terakhir, dimana harga rata-rata CPO global dibawah US\$1000 per metrik ton.

Selain itu adanya kebijakan baru di beberapa negara tujuan ekspor membuka peluang lebih besar minyak sawit sebagai pemenuhan kebutuhan minyak nabati global, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh Dewan Energi Nasional Brazil yang memperbolehkan produksi biodiesel dalam negeri menggunakan bahan baku impor, yang pada akhirnya membuka peluang minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel di Brazil. Disamping itu ada juga kebijakan Rusia untuk mengamankan stok dalam negerinya dengan menaikkan tarif ekspor dari 6,5% menjadi 30% membuat pengurangan pasokan biji bunga matahari dan rapeseed di pasar global. Kondisi ini pun didukung dengan adanya kondisi penanaman rapeseed tahun 2021 di Uni Eropa yang berada di bawah rata-rata yang dicanangkan sehingga memberikan peluang besar bagi penggunaan minyak sawit.

Menguatnya pertumbuhan sektor pertambangan dan industri pengolahan ternyata juga turut mempengaruhi pertumbuhan sektor listrik dan gas. Hal ini terjadi karena naiknya permintaan listrik dan gas dari industri CPO dan sektor pertambangan.

Perdagangan dan jasa keuangan juga mengalami pertumbuhan positif yang disebabkan menguatnya perekonomian daerah, dan jika perekonomian menguat maka aktivitas perdagangan dan jasa keuangan juga akan cenderung mengalami percepatan pertumbuhan. Selain itu sebagian besar lapangan usaha yang terkait dengan

penanganan Covid-19 dan aktivitas new normal mengalami pertumbuhan yang membaik, diantaranya adalah jasa kesehatan dan kegiatan social, informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan.

Namun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2023 diperkirakan akan tumbuh lebih baik dari tahun 2021, perbaikan tersebut sejalan dengan peningkatan aktivitas perekonomian global maupun nasional. Peningkatan dan mobilitas masyarakat akan berangsur pulih, pandemi Covid-19 diperkirakan secara perlahan dapat dikendalikan didukung oleh program Vaksinasi Covid-19. Disamping itu program stimulus fiskal pemerintah juga akan berlanjut untuk menopang daya beli masyarakat.

Kinerja tiga sektor penopang utama perekonomian Tanah Bumbu yakni sektor pertambangan dan penggalan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor industri pengolahan diprakirakan akan tumbuh meningkat. Sektor pertambangan meningkat dengan mulai dibukanya perekonomian dari berbagai kebijakan pembatasan sosial dan penguncian wilayah (*lock down*) membuat permintaan energi pulih dan meningkat secara signifikan. Hal ini melambungkan harga komoditi energi, mulai dari gas alam, minyak bumi, dan tidak terkecuali batu bara. Selain itu krisis energi membuat negara-negara Eropa tidak punya pilihan selain menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara untuk mengatasi tingginya harga dan terbatasnya pasokan gas, yang merupakan salah satu sumber energi utama selain energi baru terbarukan (EBT). Sama juga seperti Eropa, China yang sebenarnya merupakan salah satu negara terdepan dalam pengembangan EBT harus jatuh dalam krisis energi karena produksi pembangkit EBT yang dibawah harapan.

Sementara kinerja sektor pertanian juga diprediksi akan membaik dengan meningkatnya permintaan CPO dari negara mitra dagang. Sejalan dengan membaiknya kinerja sektor pertanian maka industri pengolahan juga akan tumbuh lebih baik dengan meningkatnya permintaan CPO.

## **B. Inflasi (Inflasi Provinsi Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2022)**

Perhitungan inflasi Kabupaten Tanah Bumbu saat ini belum tersedia sehingga Inflasi dari Kabupaten Kotabaru menjadi pedoman inflasi bagi Kabupaten Tanah Bumbu karena Kabupaten Kotabaru merupakan kabupaten yang letaknya paling dekat dengan Kabupaten Tanah Bumbu dibandingkan dengan Kabupaten Tabalong dan Kotamadya Banjarmasin yang juga telah melakukan perhitungan inflasi . Angka inflasi yang disajikan ini menggambarkan fluktuasi harga secara umum di Kabupaten Kotabaru.

Secara tahunan, inflasi pada tahun 2021 tercatat sebesar 2,68%, meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 1,43%. Inflasi terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau, diikuti oleh kelompok penyediaan makanan dan minuman (restoran) serta kelompok pakaian. Selain itu penurunan pasokan daging ayam ras juga turut mempengaruhi peningkatan inflasi tahun 2021.

Secara keseluruhan tahun 2021, inflasi lebih tinggi dari tahun 2020 karena adanya dorongan peningkatan inflasi dari seluruh komponen terutama komponen makanan, minuman dan tembakau serta peningkatan konsumsi rumah tangga sejalan dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat. Laju inflasi tahun 2021 mencapai 2,68%, hal ini menunjukkan bahwa inflasi di daerah tetap terkendali dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional yakni  $3\pm 1\%$ .

Sementara itu laju inflasi tahun 2023 akan terus diupayakan berada dalam tren menurun.

### **2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2023**

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu tidak terlepas dari tantangan dan prospek perekonomian nasional maupun global. Sejak saat wabah virus corona (Covid-19) menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, tanpa kecuali Indonesia, pertumbuhan ekonomi global pun diprediksi melambat. Namun memasuki tahun 2023 kinerja perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu diperkirakan membaik dibandingkan dengan kinerja perekonomian tahun 2021 dan 2022. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 yang secara perlahan sudah mulai dapat dikendalikan serta didukung dengan adanya program vaksinasi

Covid-19 sehingga mendorong kinerja konsumsi, investasi dan ekspor daerah.

Hal lain yang menjadi perhatian untuk proyeksi kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu ke depan adalah pertimbangan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN Tahun 2022 dan Tahun 2023.

Tabel 2.3  
Asumsi Makro APBN 2022 dan 2023

<b>Indikator</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2	5,3-5,9
Inflasi (%)	3	2,0-4,0
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.350	13.800-15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barrel)	63	75
Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr)	703	652-750
Lifting Gas (Juta barel/hr)	1.036	1.082-1.195

Sumber : RKP Tahun 2023 dan RPJMN 2020-2024

Berikut adalah identifikasi tantangan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023:

a. Kebijakan fiscal dari pemerintah pusat

Dengan adanya pandemi covid-19 memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi antara lain menurunnya penerimaan negara serta ketidak pastian ekonomi nasional. Kondisi ini menyebabkan target pendapatan daerah melalui dana transfer mengalami pengurangan.

b. Adanya percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi

Dengan adanya percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi menuntut adanya peningkatan kualitas SDM masyarakat agar bisa bersaing dengan pencari kerja dari luar daerah.

c. Masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan.

Pemerintah daerah mengalami tantangan berat pada masa Pandemi Covid-19 terutama dalam hal mengatasi keterbatasan



anggaran yang muncul akibat kelesuan perekonomian. Dan terbatasnya anggaran untuk pembiayaan pembangunan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan sehingga untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan alternatif dan inovatif.

- d. Penguatan ketahanan pangan, dimana Kabupaten Tanah Bumbu memiliki ketergantungan yang sangat besar untuk mendapatkan pasokan dari luar daerah dan dari daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakatnya seperti daging, susu dan telur.
- e. Ketergantungan akan kondisi pasar dunia  
Sektor industri pengolahan terutama industri CPO yang merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi kabupaten Tanah Bumbu merupakan sektor yang prospeknya sangat tergantung pada perekonomian dunia. Apabila permintaan CPO menurun, kondisi industri CPO di Tanah Bumbu pun ikut turun. Berlaku juga untuk sebaliknya apabila permintaan dunia akan CPO mengalami kenaikan.
- f. Belum tertatanya infrastruktur pendukung  
Penataan zonasi kawasan belum terintegrasi satu sama lain, hal ini terlihat dari zona industri hulu dan zona industri hilir tidak saling terhubung. Padahal dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan katalisator diantara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir. Infrastruktur yang perlu tersedia diantaranya adalah akses jalan, akses air bersih, akses internet, dan pemenuhan kebutuhan listrik. Infrastruktur jalan yang sudah terbangun dalam kondisi baik masih menghubungkan zona – zona pelayanan dasar belum mengarah ke zona industri. Kabupaten Tanah Bumbu harus melakukan optimalisasi upaya dalam menjamin percepatan pembangunan infrastruktur agar dapat memacu sektor ekonomi produktif.
- g. Masih tingginya tingkat pengangguran  
Hal pertama yang menjadi tantangan dalam menekan naiknya tingkat pengangguran adalah terkait struktur tenaga kerja di Kabupaten Tanah Bumbu yang sebagian besar masih didominasi oleh tamatan pendidikan SMP dengan skill yang terbatas.

- h. Belum berkembangnya UMKM  
Tantangan kedepan yang harus disikapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah masih sulitnya UMKM untuk berkembang. Meskipun jumlahnya banyak namun perkembangannya UMKM stagnan. Kuantitas tersebut belum mampu berbanding lurus dengan kualitas lantaran UMKM belum bisa tumbuh menjadi lebih besar lagi sesuai dengan potensinya.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pengembangan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi;
- c. Percepatan penataan infrastruktur;
- d. Penciptaan peluang kerja bagi pencari kerja;
- e. Penguatan pangan daerah dengan memaksimalkan potensi-potensi daerah.
- f. Memberikan dukungan terhadap pengembangan UMKM daerah dengan pemberian pelatihan peningkatan SDM, bantuan promosi produk, dan fasilitasi permodalan.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi pendorong ekonomi Kabupaten Tanah Bumbu adalah:

1. Posisi Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kawasan yang strategis karena berdekatan dengan calon Ibukota Negara Baru yang terletak di Penajam Paser Utara, selain itu Kabupaten Tanah Bumbu juga memiliki jalur laut maupun udara berskala nasional, serta ditetapkan menjadi Kawasan Industri Batulicin.
2. Potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Tanah Bumbu baik di sektor pertambangan, pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata yang dapat mendorong ekonomi masyarakat.
3. Adanya upaya pemerintah pusat melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 yang diharapkan dapat menekan penyebaran Covid-19 sehingga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi di kabupaten Tanah Bumbu dengan adaptasi kebiasaan baru (new normal).

### **BAB III**

## **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang dirancang sebagai keberlanjutan upaya yang telah dimulai pada RPJMN periode 2020- 2024. Sehingga, tema yang ditetapkan untuk RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut: “Penguatan Infrastruktur dan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Untuk Optimalisasi Kapabilitas Daerah Bernuansa Kearifan Lokal yang Religius”.

Dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan. Dalam penyusunan RKP 2023, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah:

1. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
2. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
3. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP 2021 tema utama adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang dilaksanakan dalam Tujuh Prioritas Nasional;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.

Visi dan misi pembangunan dalam RPJP Nasional menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang fokus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Selain itu, tujuan RPJMN IV

tahun 2020–2024 telah sejalan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* yang sebagian besar dari tujuan global telah tercermin dalam agenda nasional.

Selanjutnya sesuai dengan tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 dan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga 2023, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 antara lain pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,4% - 6,0%. Asumsi tersebut lebih rendah dari kerangka ekonomi makro 2020 di kisaran 4,5%-5,5%. Selain itu, inflasi di kisaran 2% - 4% (yoy) dan tukar rupiah Rp.13.900-15.000 per dollar AS.

Tabel 3.1  
Asumsi Makro RAPBN 2022 dan 2023

Indikator	2022	2023
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,51-5,00	4,51-5,0
Inflasi (%)	2,5	2,0-4,0
Nilai Tukar (Rp/USD)	14.450	13.900-15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (USD/barrel)	45	60-70
Lifting Minyak Bumi (Rb barel/hr)	705	636-735
Lifting Gas (Juta barel/hr)	1.007	1.232-1.341

Sumber : RKP Tahun 2021 dan RPJMN 2020-2024

### **3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan**

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Sosial dengan Memperhatikan Lingkungan” dengan asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 antara lain, pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,00% - 4,50%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 71,20-72,60 dan Angka Kemiskinan di kisaran 4,10%-4,50%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kisaran 4,10-4,20% dan Gini Ratio di kisaran 0,340.

Tabel 3.1  
Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	4,00 – 4,50
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,20-72,60
3	Angka Kemiskinan (%)	4,10 – 4,50
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,10 – 4,20
5	<i>Gini Ratio</i>	0,340

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

### 3.3. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD Kabupaten Tanah Bumbu

Tema Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 adalah “Memantapkan sumber daya manusia yang produktif dan berakhlak mulia untuk percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan” dengan asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 antara lain, pertumbuhan ekonomi di kisaran 3,00% - 3,50%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kisaran 71,46-72,20 dan Angka Kemiskinan di kisaran 4,29%-4,19%. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di kisaran 6,02-5,88% dan Gini Ratio di kisaran 0,300.

Tabel 3.2  
Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023

No.	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	3,00 – 3,50
2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,46 –72,20
3	Angka Kemiskinan (%)	4.29 - 4.19
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6.02 - 5.88
5	<i>Gini Ratio</i>	0,300

Sumber: RKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

#### **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. APBD disusun dengan mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi Kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Pembiayaan Daerah

APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Landasan administrasi yang mengatur pengelolaan anggaran daerah antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib dan taat asas agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar. Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah :

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Aspek penting dalam penyusunan anggaran adalah penyelarasan kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*) dengan penganggaran (*budget*) antara pemerintah dan pemerintah daerah agar tidak tumpang tindih.

Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang diinginkan adalah:

1. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil.
3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
4. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
5. Aspek Pembinaan, Perencanaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi pembangunan, perencanaan dan anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan SKPD lebih realistis, terukur serta akuntabel perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023, dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *Money Follow Program*.

#### **4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan Untuk Tahun 2023**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan Hak Daerah dalam dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### **4.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

1. Pajak Daerah

Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Pajak Daerah.

2. Retribusi Daerah

Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai Retribusi Daerah.

3. Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan Modal Daerah.

4. Lain lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;

c. Hasil kerjasama daerah;

d. Jasa giro;

e. Hasil pengelolaan dana bergulir;

f. Pendapatan bunga;

g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;

h. Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;

i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;

j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

k. Pendapatan denda Pajak Daerah;

l. Pendapatan denda Retribusi Daerah;

m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

n. Pendapatan dari pengembalian;



- o. Pendapatan dari BLUD;
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

#### **4.1.2. Pendapatan Transfer**

1. Transfer Pemerintah Pusat-Dana perimbangan
  - a) Dana Bagi Hasil (DBH);
  - b) Dana Alokasi Umum (DAU).
  - c) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik/Non Fisik;
  - d) Dana insentif daerah;
2. Transfer Antar Daerah
  - a. Pendapatan bagi hasil

Merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
  - b. Bantuan keuangan

Merupakan dana yang diterima dari Daerah Lainnya baik dalam rangka kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/ atau tujuan tertentu lainnya, yang terdiri dari:

    - 1) Bantuan Keuangan dari Daerah Provinsi;
    - 2) Bantuan Keuangan dari Daerah Kabupaten.

#### **4.1.3. Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah**

1. Dana Hibah

Merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Darurat

Merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berkenaan dengan sumber-sumber pendapatan yang penetapannya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu belum memasukkan Dana Alokasi Khusus (DAK) kedalam struktur APBD Tahun Anggaran 2023. DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2023 atau informasi resmi mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun anggaran 2023 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2023. Sehubungan dengan hal tersebut maka Dana Alokasi Khusus belum ditambahkan dalam struktur APBD pada dokumen Rancangan KUA dan PPAS.

Dalam rangka untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah maka dilakukan berbagai upaya melalui formulasi arah kebijakan umum pendapatan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 yang akan ditempuh meliputi:

1. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Mengoptimalkan peningkatan pendapatan daerah yang yang berasal dari sumber-sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
3. Meningkatkan efesiensi pengelolaan APBD dari sisi pendapatan.
4. Mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

5. Meningkatkan sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah yang lebih rasional dan proporsional.

#### **4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp.1.402.140.721.245,00 namun belum termasuk pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK). DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Adapun rincian proyeksi target pendapatan per Objek Pendapatan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Bumbu yang bersumber dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, secara keseluruhan target PAD pada Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan Rp.233.373.599.113,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp.1.136.733.921.536,00.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Target pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.32.033.200.596,00.

Adapun proyeksi pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun anggaran 2023 digambarkan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4. 1  
Proyeksi Target Pendapatan Daerah Pada Tahun Anggaran 2023

<b>KODE</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RANCANGAN KUA 2023</b>	<b>Komposisi %</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.402.140.721.245,00</b>	
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>233.373.599.113,00</b>	<b>16,64%</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	104.509.945.199,00	<b>7,45%</b>
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	16.844.015.572,00	<b>1,20%</b>
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.084.298.694,00	<b>0,43%</b>
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.935.339.648,00	<b>7,56%</b>
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.136.733.921.536,00</b>	<b>81,07%</b>
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.006.264.961.000,00	<b>71,77%</b>
4.2.02	Transfer Antar Daerah	130.468.960.536,00	<b>9,30%</b>
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>32.033.200.596,00</b>	<b>2,28%</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	32.033.200.596,00	<b>2,28%</b>

Dilihat dari proporsinya, kelompok Pendapatan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap total pendapatan pada Proyeksi Target Pendapatan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2023 adalah Pendapatan Transfer dengan persentase sebesar 81,07% sementara itu untuk kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 2,28% dan Pendapatan Asli Daerah hanya berkisar 16,64%.

**BAB V  
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

**5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja**

Belanja Daerah adalah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan diakui sebagai pengurangan ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu (1) tahun anggaran.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Operasi

Merupakan Pengeluaran Anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

2. Belanja Modal

Merupakan Pengeluaran Anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja Tidak Terduga

Merupakan Pengeluaran Anggaran atau Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Merupakan Pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa. Pengelolaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, kebijakan perencanaan belanja daerah antara lain :

1. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.
2. Kebijakan belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan

standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

3. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip “*value for money*”.
4. Pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran Kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.
5. Pendekatan *money follow program*, adalah penerapan penganggaran pembangunan yang tidak lagi berorientasi pada aspek pemerataan tanpa memperhatikan aspek program prioritas. Penganggaran pembangunan akan lebih fokus pada program prioritas sehingga seluruh pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu akan memiliki nilai manfaat untuk masyarakat.
6. Pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik atau pelayanan publik, terutama masyarakat miskin dan kurang beruntung, dikelola dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*).
7. Belanja daerah disusun berdasarkan sasaran atau target kinerja yang harus terukur capaiannya (*performance based budgeting*).
8. Melanjutkan penganggaran belanja yang sifatnya multiyears (penganggaran tahun jamak).

9. Untuk mendukung program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui penyediaan dana pendampingan.
10. Melakukan efisiensi belanja, yaitu dengan mengutamakan belanja yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. melalui belanja modal maupun belanja bantuan yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat.
11. Disamping itu, pengeluaran daerah harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait, mendasarkan pada, standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip “*Value For Money*” (ekonomis, efisien dan efektif).

Pada tahun anggaran 2023 rencana alokasi Belanja Daerah diperkirakan mencapai Rp.1.418.561.678.643,00 yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Bagi Hasil.

Tabel 5.1  
Proporsi Anggaran Belanja langsung Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2023

<b>REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RANCANGAN KUA 2023</b>	<b>Komposisi</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.418.561.678.643,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.057.674.946.644,00</b>	<b>74,56%</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	501.086.615.008	35,32%
5.1.2	Belanja Barang	514.584.748.636	36,28%
5.1.3	Belanja Hibah	40.043.583.000	2,82%
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	1.960.000.000	0,14%
5.1.5	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.554.148.522</b>	<b>17,31%</b>
5.2.1	Belanja Tanah	567.217.000	0,04%
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	18.309.116.264	1,29%
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	90.079.504.694	6,35%
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.172.390.564	9,53%
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.425.920.000	0,10%
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>0,21%</b>

5.3.1	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	0,21%
<b>6</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>112.332.583.477</b>	<b>7,92%</b>
6.2.1	Belanja Bagi Hasil	-	-
6.2.2	Belanja Bantuan Keuangan	112.332.583.477	<b>7,92%</b>

## **5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga**

### **5.2.1. Belanja Operasi**

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5 persen dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- d. Penganggaran tambahan penghasilan kepada seluruh PNSD baik pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat lainnya maupun PNSD Non Jabatan.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.



f. Kebijakan Belanja Hibah diberikan kepada organisasi, instansi atau lembaga yang membantu atau mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga organisasi atau lembaga yang diberi hibah perlu dilakukan secara selektif, akuntabel, transparansi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Kebijakan Belanja Bantuan Sosial dilaksanakan khusus untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, melalui pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat yang akan dilakukan secara selektif/tidak mengikat dengan jumlah yang dibatasi. Penyelenggaraan belanja hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bansos yang bersumber dari APBD.

Belanja Operasi Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 sebesar Rp.1.057.674.946.644,00. Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Operasi sesuai dengan jenis belanjanya dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Tabel 5.2.

Proporsi Anggaran Belanja Operasi Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2023

<b>REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RANCANGAN KUA 2023</b>	<b>Komposisi</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.418.561.678.643,00</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.057.674.946.644,00</b>	<b>74,56%</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	501.086.615.008	47,38%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	514.584.748.636	48,65%
5.1.5	Belanja Hibah	40.043.583.000	3,79%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.960.000.000	0,19%

Jika dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi Belanja Operasi terhadap total alokasi belanja daerah tahun 2023 yaitu sebesar

Rp.1.057.674.946.644,00 (74,56%) dari total belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.418.561.678.643,00.

Belanja Pegawai Bagi ASN, mempunyai proporsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 47,38% terhadap Belanja Operasi, alokasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.501.086.615.008,00.

Belanja Barang dan Jasa mempunyai proporsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 48,65% terhadap Belanja Operasi, alokasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.514.584.748.636,00.

Belanja Hibah mempunyai proporsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 3,79% terhadap Belanja Operasi, alokasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.40.043.583.000,00.

Belanja Bantuan Sosial mempunyai proporsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,19% terhadap Belanja Operasi, alokasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.960.000.000,00.

### **5.2.2. Belanja Modal**

a. Menitikberatkan alokasi belanja Daerah pada bidang-bidang urusan wajib dan bidang Urusan pilihan yang sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Prioritas Pembangunan Daerah adalah :

1. Bidang Pendidikan, khususnya pada Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas
2. Bidang Kesehatan, khususnya pada Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan, Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan dan Jaminan Kesehatan untuk Masyarakat Tanah Bumbu.
3. Bidang Infrastruktur, khususnya pada Pemenuhan Layanan Infrastruktur Dasar dan Penanganan Bencana
4. Tata Kelola Pemerintahan, khususnya pada Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima, Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Kapasitas Keuangan Daerah.

Sementara itu Prioritas Pembangunan Daerah di dalam Urusan Pilihan terutama pada bidang-bidang :

1. Pertanian, dengan fokus peningkatan produktivitas pertanian, Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian tepat guna dan Peningkatan infrastruktur pertanian.
2. Perikanan, dengan fokus pada Pengembangan Budidaya Ikan dalam skala besar.

Belanja Modal Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2023 sebesar Rp. 245.554.148.522,00 atau sebesar 17,31% dari Total Belanja. Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Modal sesuai dengan jenis belanjanya dapat dilihat pada matrik sebagai berikut :

Tabel 5.3.  
Proporsi Anggaran Belanja Modal Kabupaten Tanah Bumbu Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

REK.	URAIAN	RANCANGAN KUA 2023	% Komposisi
1	2	3	4
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.418.561.678.643,00</b>	
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>245.554.148.522,00</b>	<b>17,31%</b>
5.2.1	Belanja Tanah	567.217.000,00	0,23%
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	18.309.116.264,00	7,46%
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	90.079.504.694,00	36,68%
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	135.172.390.564,00	55,05%
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.425.920.000,00	0,58%

Jika dilihat dari total alokasi belanja, maka proporsi Belanja Modal terhadap total alokasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp.245.554.148.522,00 atau 17,31% dari total belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.418.561.678.643,00.

Belanja Tanah mempunyai proporsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,23% terhadap Belanja Modal, dengan alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.567.217.000,00.

Belanja Peralatan dan Mesin mempunyai proporsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 7,46% terhadap Belanja Modal, dengan alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.18.309.116.264,00.

Belanja Bangunan dan Gedung mempunyai proporsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 36,68% terhadap Belanja Modal, dengan alokasi Anggaran tahun 2023 sebesar Rp.90.079.504.694,00.

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Lainnya mempunyai proporsi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 55,05% terhadap Belanja Modal, dengan alokasi anggaran Tahun 2023 sebesar Rp.135.172.390.564,00.

Belanja Aset Tetap Lainnya mempunyai proporsi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar 0,58% terhadap Belanja Modal, dengan alokasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.425.920.000,00.

### **5.2.3. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (0,21%) dari total belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.418.561.678.643,00. Belanja ini diperuntukan untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Tabel 5.4.  
Proporsi Anggaran Belanja Tidak Terduga Kabupaten Tanah Bumbu  
Berdasarkan Jenis Belanja Tahun Anggaran 2023

<b>REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RANCANGAN KUA 2023</b>	<b>Komposisi</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.418.561.678.643,00</b>	
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>0,21%</b>
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	0,21%

### **5.2.4. Belanja Transfer**

Belanja Transfer ini terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja ini merupakan Bantuan Keuangan kepada Desa, kebijakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa diarahkan untuk penguatan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dengan tujuan untuk memperkuat kemampuan keuangan desa. memberikan keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan. Pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa. mendorong terciptanya demokrasi desa dan meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam rangka mendukung kebijakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sekaligus untuk melaksanakan amanat Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pasal 95 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47

tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun Anggaran 2020 tetap melaksanakan Program Satu Milyar Satu Desa. Melalui program yang di dalamnya terdapat Alokasi Dana Desa (ADD) ini diharapkan akses masyarakat desa terhadap kebutuhan dasar. Khususnya terhadap layanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur jalan dapat ditingkatkan secara signifikan.

Untuk lebih jelasnya proporsi Alokasi Belanja Transfer tertuang pada matrik sebagai berikut :

Tabel 5.5.

Proporsi Anggaran Belanja Transfer Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2023

<b>REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RANCANGAN KUA 2023</b>	<b>Komposisi</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>6</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>112.332.583.477</b>	<b>7,92%</b>
6.2.1	Belanja Bagi Hasil	-	-
6.2.2	Belanja Bantuan Keuangan	112.332.583.477	<b>7,92%</b>

Belanja Transfer Tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp.112.332.583.477,00 atau 7,92% dari Total Belanja secara keseluruhan.

**BAB VI  
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Kebijakan penerimaan pembiayaan akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pengeluaran pembiayaan mencakup penyertaan modal (investasi) yang ditetapkan dengan peraturan daerah, pembayaran pokok hutang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah.

Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada penyusunan APBD adalah melalui defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari sisa lebih anggaran dari tahun lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintah dan program-program pembangunan yang cukup besar dan memenuhi skala prioritas.
2. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian Kabupaten Tanah Bumbu dengan penambahan jumlah uang yang beredar melalui pengeluaran pemerintah dan akan mengundang masuknya investasi swasta.

Tabel 6.1  
Proporsi Anggaran Belanja pembiayaan daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan jenis belanja Tahun Anggaran 2023

<b>REK.</b>	<b>URAIAN</b>	<b>RANCANGAN KUA 2023</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>7</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>7.1</b>	<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>21.420.957.398,00</b>
7.1.1	Penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA)	21.420.957.398,00
<b>7.2</b>	<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>5.000.000.000,00</b>
7.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00

### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA) digunakan untuk menutupi selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah diperlukan transaksi Keuangan Daerah yang disebut dengan Pembiayaan Daerah. Apabila Belanja Daerah melebihi dibandingkan dengan pendapatan Daerah maka terjadi transaksi yang defisit. Diproyeksikan dana SILPA Tahun 2023 sebesar Rp.21.420.957.398,00.

### **6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.**

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2023 diarahkan kepada penyertaan modal atau investasi kepada perusahaan daerah. Penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Badan Usaha Lainnya dapat dianggarkan dalam APBD apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga, Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat.

Rencana alokasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,00.

## **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

### **7.1. Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan pembangunan menjadi pertimbangan atau isu yang penting dan strategis untuk dicarikan pemecahan atau solusinya sebagai prioritas pembangunan daerah. **Berbagai permasalahan yang menjadi isu penting dan strategis tersebut adalah:**

1. Masih tingginya tingkat kemiskinan;
2. Masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan
4. Masih rendahnya kompetensi pencari kerja
5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menciptakan Kota Layak Anak
6. Masih kurangnya fasilitas pertumbuhan untuk lembaga/yayasan pesantren/pendidikan non formal
7. Belum maksimalnya pengelolaan pariwisata dan kebudayaan;
8. Masih kurangnya ketersediaan lapangan kerja;
9. Belum optimalnya pembinaan UKM dan UMKM;
10. Masih rendahnya kesejahteraan petani, nelayan dan peternak;
11. Belum optimalnya produktivitas perikanan;
12. Kurangnya inovasi dan kreasi produk UKM;
13. Belum optimalnya produktivitas pertanian;
14. Belum optimalnya realisasi investasi;
15. Luas lahan yang teraliri irigasi masih rendah;
16. Kondisi jalan mantap masih kurang;
17. Ketersediaan air baku masih rendah;
18. Masih rendahnya akses air minum dan sanitasi;
19. Rendahnya persentase lingkungan permukiman dengan status sehat;
20. Belum optimalnya layanan sektor perhubungan;
21. Masih terdapat Rumah Tangga Miskin yang belum teraliri listrik;
22. Masih terdapat rumah tinggal yang tidak layak huni;
23. Belum adanya kawasan khusus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;



24. Masih rendahnya infrastruktur jaringan telekomunikasi di desa
25. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan;
26. Belum optimalnya pengelolaan sampah;
27. Kurangnya upaya mitigasi bencana;
28. Pengelolaan potensi pendapatan belum optimal;
29. Masih adanya desa sangat tertinggal dan tertinggal;
30. Penyederhanaan perizinan;
31. Hasil evaluasi AKIP masih belum optimal;
32. Manajemen ASN masih belum optimal

## 7.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran Pembangunan tahun rencana 2021 di Kabupaten Tanah Bumbu mempertimbangkan beberapa aspek yaitu diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu 2006-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, isu strategis dan masalah mendesak yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan memperhatikan urgensi, efisiensi, efektivitas serta daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah dan kerangka ekonomi daerah. Selain itu aspek yang juga menjadi pertimbangan adalah kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan, hal ini untuk menjamin adanya keselarasan dan sinergitas antara pembangunan pusat dan daerah.

Tabel 7.1.  
Tujuan dan Sasaran Pembangunan

<b>Visi : MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS</b>		
<b>Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia</b>		
No	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas SDM	Meningkatnya Mutu Pendidikan
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja
		Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat
		Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban
		Meningkatnya Kualitas Kepemudaan
2	Mewujudkan Tanah Bumbu sebagai Serambi Madinah	Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani
<b>Misi 2 : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap Untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian</b>		
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan
		Meningkatnya Sistem Irigasi Berkinerja Baik
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman
		Meningkatnya Kualitas Air Minum dan Sanitasi

		Menurunkan Resiko Bencana
<b>Misi 3 :</b> Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan		
1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan	Meningkatkan Kualitas Air dan Udara
		Meningkatkan Tutupan Lahan
<b>Misi 4 :</b> Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri		
1	Meningkatkan Pertumbuhan EKonomi	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata
		Meningkatnya nilai tambah Sektor Pertanian
		Meningkatnya Iklim Investasi
		Meningkatnya nilai tambah Sektor Industri dan Perdagangan
<b>Misi 5 :</b> Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel		
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Akutabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
		Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
		Meningkatkan Kemandirian Desa
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

### 7.3. Prioritas Pembangunan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan Nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.

#### 7.3.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023: “Penguatan Infrastruktur dan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan Untuk Optimalisasi Kapabilitas Daerah Bernuansa Kearifan Lokal yang Religius”, pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
  - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
  - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5 T
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
  - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
  - b. Nilai Tukar Petani 102-104
  - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
  - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
  - e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton
  - f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn

4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
  - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
  - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
  - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
  - c. Panjang jalan tol baru: 400 km
  - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m<sup>3</sup>/s
  - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR
  - f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
  - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
  - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
  - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
  - c. 72.500 SDM talenta digital
  - d. 12,4 juta local champion literasi digital
  - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
  - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap Baseline 26,87%
  - b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap Baseline 21,54%
  - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
  - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW

8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%
  - b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
  - c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%
  - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
  - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
  - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%
  - d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT)
  - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
  - b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk
  - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
  - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
  - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
  - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
  - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
  - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2023, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48

5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

### **7.3.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023**

Berdasarkan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023, tema Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 adalah “Memantapkan Pemulihan Ekonomi Dan Sosial Dengan Memperhatikan Lingkungan”,

Tema tersebut dapat diturunkan menjadi 4 fokus pembangunan sebagai berikut.

1. Kesehatan, Pendidikan dan Keterampilan
2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah
3. Investasi Hilirisasi Industri, Pertanian dan Pariwisata
4. Banjir, Kebakaran Hutan dan Lahan dan Covid-19

dengan prioritas daerah diarahkan pada :

1. Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata
2. Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
3. Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian
4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
5. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana
6. Kalsel Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru.

### **7.3.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023**

Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu pada Tahun 2023 merupakan tahun kedua dan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Tema RKPD Tahun 2023 adalah “Memantapkan sumber daya manusia yang produktif dan berakhlak mulia untuk percepatan pemulihan ekonomi dan pembangunan”, dengan prioritas:

#### **1. Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global**

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Perbaikan Kualitas dan Akses Penyelenggaraan Pendidikan secara Luas

- b. Peningkatan Upaya Promotif dan Preventif Kesehatan
- c. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
- d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
- e. Peningkatan Kapasitas, Kompetensi dan Daya Saing Pemuda
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- g. Peningkatan Layanan Dasar Masyarakat Miskin dan Rentan
- h. Peningkatan Akses dan Kualitas Perlindungan Perempuan dan Anak Serta Pemberdayaan Perempuan
- i. Peningkatan Kualitas Perlindungan Masyarakat.

**2. Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan**

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Peningkatan Produktivitas Pertanian
- b. Pembangunan Sarana Prasarana Perdagangan
- c. Peningkatan Nilai Investasi
- d. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Industri Kecil Menengah
- e. Peningkatan Kunjungan Wisatawan
- f. Perlindungan PMKS
- g. Peningkatan akses, perlindungan, pemberdayaan masyarakat miskin
- h. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja

**3. Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan**

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Peningkatan Jalan dan Pembangunan Jalan Baru
- b. Peningkatan Pelayanan Perhubungan
- c. Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman
- d. Peningkatan Cakupan Akses Sanitasi
- e. Peningkatan Kualitas dan Penataan Lingkungan Permukiman dan Kawasan Perkotaan yang Strategis
- f. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir
- g. Peningkatan Kesiapsiagaan Pra-Bencana, Penanganan Bencana dan Pemulihan Paska Bencana
- h. Peningkatan Pengendalian dan Pemanfaatan Fungsi Ruang
- i. Peningkatan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

**4. Pembangunan Masyarakat yang Agamis**

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Peningkatan Pengembangan Kebudayaan
- b. Peningkatan Pembinaan Keagamaan dan Wawasan Kebangsaan Perorangan/Kelompok
- c. Peningkatan Pembinaan Pembangunan Keluarga

**5. Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional**

Dengan Sub Prioritas yaitu:

- a. Mendukung Percepatan Penyederhaan Birokrasi
- b. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima
- c. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah
- d. Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah
- e. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
- f. Peningkatan Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
- g. Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa
- h. Peningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Dasar Bagi Pembangunan Daerah.

Tabel 7.2. Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten

No.	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi	Prioritas Kabupaten
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Hilirisasi Industri, Peningkatan Sektor Pertanian dan Pariwisata	Pemulihan Investasi, Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Penanggulangan Kemiskinan
		Kalsel Sebagai Gerbang dari Food Estate dan Ibu Kota Negara Baru	
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Pembangunan SDM yang Memiliki Daya Saing Global
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pembangunan Masyarakat yang Agamis
5	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memperkuat Sarana Prasarana Dasar dan Perekonomian	Pembangunan Infrastruktur yang Terpadu dan Merata Berwawasan Lingkungan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan Memperkuat Mitigasi Ketahanan Bencana	
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Pemantapan Pelayanan Pemerintahan dan Penyederhaan Birokrasi yang Bersih, Berwibawa dan Profesional



Selanjutnya dalam rangka mendukung percepatan pemulihan Covid-19 Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengembangkan strategi dan arah kebijakan dalam hal pola dan pendekatan pelaksanaan pembangunan di masa Pasca Covid-19. Strategi dan arah kebijakan Adaptasi Kebiasaan Baru antara lain :

- a. Implementasi dan sosialisasi Protokol Kesehatan selama Pandemi Covid-19 dan perilaku hidup bersih dan sehat kepada seluruh masyarakat;
- b. Memperkuat layanan dan fasilitas kesehatan hingga seluruh wilayah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Penyesuaian aktivitas di seluruh sektor kehidupan masyarakat dengan memperhatikan kondisi selama pandemi Covid-19;
- d. Peningkatan peran serta pemuka agama dalam memberikan pemahaman kepada umat tentang upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19;
- e. Penyesuaian berbagai target pembangunan dengan memperhatikan efek dan dampak dari pandemi Covid-19.

#### **7.4. Indikator Pembangunan Tahun 2023**

Untuk menyelaraskan agenda Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah yang belum tertangani sebagaimana tertuang dalam rancangan RKP dan RKPD Provinsi Tahun 2023, maka dirumuskan target Indikator Makro Daerah serta target indikator per Misi Pembangunan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Indikator Makro Daerah

Tabel 7.3. Indikator Makro Daerah  
Kabupaten Tanah bumbu tahun 2023

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target 2023*</b>
Peningkatan IPM	71,46 -72,20
a. AHH	70.81 - 70.91
b. Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,11 – 8,23
c. Angka Harapan Lama Sekolah	12,386 – 12.394
Pengeluaran Perkapita	12.429
Angka Pengangguran	6.02 - 5.88
Pertumbuhan Ekonomi	3,00 – 3,50
PDRB Perkapita (Jt/Rp)	46.76
Angka Kemiskinan	4.29 - 4.19
Indeks Gini	0,300
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	74,16-75,06



**b. Indikator Misi Daerah**

Tabel 7.4. Indikator Misi Daerah

MISI 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja Tahun		
					2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatkan	Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,17	71,09 – 71,45	71,46 – 72,20	72,21 – 72,57
	1. Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,96	7,98 - 8,10	8,11 – 8,23	8,24 – 8,31
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,370	12,375 – 12,385	12,386 – 12,394	12,395 – 12,405
	2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan hidup	Tahun	70,34	70,40 - 70,80	70,81 - 70,91	70,92 - 71,32
		3. Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,16	70,18 - 70,48	70,49 - 70,53
	Tingkat Pengangguran Terbuka		%	6,95	6,18 - 6,03	6,02 - 5,88	5,87 - 5,69
	4. Menurunnya Angka Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	%	4,60	4,50 - 4,30	4,29 - 4,19	4,18 - 4,04
	5. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten	KLA	592,4 (Pratama)	600-700 (madya)	700-800 (nindya)	800-900 (utama)
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	67,50	67,50 - 67,68	67,69 - 68,21	68,22 - 68,52
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	84,01	84,61 - 84,67	84,68 - 84,80	84,81 - 84,99



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

	6. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban	Angka Kriminalitas per 10,000 penduduk	%	11,24	10,00 - 9,48	9,47 - 9,00	8,99 - 7,50
	7. Meningkatnya Kualitas Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	52,00	53,00	54,00	55,00
2.	Mewujudkan Tanah Bumbu Sebagai Serambi Madinah	Indeks Kebahagiaan	Indeks	70,00	70,01-71,10	71,11 -72,20	72,21 -73,30
	1. Meningkatnya Struktur Sosial yang Madani	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	67,43	67,73 - 67,99	68,00 - 68,58	68,59 - 68,85
MISI 2	Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Wilayah	Infrastruktur yang Mantap	%	44,66	44,67 - 52,05	52,06 - 56,98	56,99 - 61,91
	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Jalan dalam kondisi mantap	%	47,77	51,00 - 52,04	52,05 - 58,99	59,00 - 59,52
	2. Meningkatnya sistem irigasi berkinerja baik	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Indeks	49,09	49,12 - 50,36	50,37 - 50,41	50,42 - 51,66
	3. Meningkatkan Kualitas Perumahan dan Pemukiman	Persentase lingkungan pemukiman yang tertata	%	0,103	0,104 - 0,148	0,149 - 0,163	0,164 - 0,254
	4. Meningkatnya kualitas air minum dan sanitasi	Cakupan pelayanan air minum aman	%	34,13	34,14 - 38,12	38,13 - 41,13	41,14 - 45,12
		Cakupan akses sanitasi layak	%	64,62	70,00 - 74,00	74,01 - 80,00	80,01 - 86,00
	5. Menurunkan resiko terjadinya bencana	Indeks Resiko Bencana	Indeks	155,60 (tinggi)	155,59 - 153,61	153,60 - 151,60	151,59 - 149,61
MISI 3	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan						



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja		
1. Meningkatkan kualitas lingkungan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	70,39	70,40-70,46	70,47-71,45	71,46-71,54
	1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	N/A	0,162 - 0,188	0,189 - 0,210	0,211 - 0,257
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	65,52	54,50-55,50	55,51-55,59	55,60-56,62
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	94,21	91,20-91,34	91,35-91,41	91,42-91,54
	2. Meningkatnya Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	57,13	58,25-58,55	58,56-60,80	60,81-61,09
MISI 4	Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1, Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi		Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,46	2,41 - 2,99	3,00 - 3,50	3,51 - 4,00
	1. Meningkatnya Nilai Tambah sektor pariwisata	Kontribusi Sektor Pariwisata (ADHB)	%	8,68	8,63 - 8,67	8,68 - 8,72	8,73 - 8,93
	2. Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pertanian	Nilai Tukar Petani	Indeks	111,24	114,50 - 115,48	115,49 - 122,25	122,26 - 123,52
		Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian (ADHK)	%	0,27	0,35 - 2,27	2,28 - 2,42	2,43 - 4,37
		Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (ADHK)	%	3,26	3,35 - 3,55	3,56 - 3,72	3,73 - 3,93



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

	3. Meningkatnya Iklim Investasi	Pertumbuhan Investasi	%	9,81	9,85 - 9,95	9,96 - 10,02	10,03 - 10,13
	4. Meningkatnya Sektor Industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	%	-4,63	-4,00 - (-2,00)	-1,99 - 0,01	0,02 - 2,02
		Pertumbuhan PDRB sektor transportasi dan pergudangan (ADHK)	%	-4,03	-4,00 - (-1,60)	-1,59 - 0,81	0,82 - 3,22
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (ADHK)	%	-4,55	-4,00 - (-0,50)	-0,49 - 3,01	3,02 - 6,52
MISI 5	Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel						
Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja		
					2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Melayani	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,68 (CC)	55,75-60,43 (CC)	60,44-60,56 (CC)	60,57-65,00 (CC)
	1. Meningkatnya Kualitas, Akuntabilitas dan Kapabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	66,30 (B)	66,35 - 68,33 (B)	68,34 - 68,44 (BB)	68,45 - 70,47 (BB)
		Penghargaan Pembangunan Daerah	Peringkat	5	1-3	1-3	1-3
		Opini BPK	Opini	WTP (2020)	WTP	WTP	WTP
		Nilai LPPD	Nilai	Sangat Tinggi (3,3104)	Sangat Tinggi (3,0506 - 3,1021)	Sangat Tinggi (3,1022 - 3,1537)	Sangat Tinggi (3,1538 - 3,2053)
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	N/A	2,51-3,25	2,51-3,25	2,51-3,25



**KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

	3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	%	6,75	5	5	5
	4. Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun (IDM)	Indeks	0,6635 (Berkembang )	0,7007- 0,7013 (Berkembang)	0,7014- 0,7020 (Berkembang)	0,7021- 0,7027 (Berkembang)

### 1.5. Program Prioritas Tahun 2023

Tabel 7.5. Program Prioritas Tahun 2023

No	Prioritas / Sasaran Prioritas		Program	Pagu Indikatif
1	Pembangunan SDM yang Berkualitas dan Berakhlak Mulia			<b>209.119.339.606</b>
1.1	a	Peningkatan Rata-rata Lama Sekolah	1. Program Pengelolaan Pendidikan	100.741.209.957
			2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	152.044.000
			3. Program Pengembangan Kurikulum	148.657.000
			4. Program Pembinaan Perpustakaan	740.234.680
			5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	48.180.000
1.2	b	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Berbasis Masyarakat	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	60.045.142.719
			2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.935.611.900
			3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	17.680.200
			4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	201.020.000
1.3	c	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	870.070.700
			2. Program Penempatan Tenaga Kerja	41.950.700
			3. Program Hubungan Industrial	65.543.700
1.4	d	Peningkatan Jaminan Sosial	1. Program Pemberdayaan Sosial	730.767.000



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

			2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.266.635.000
			3. Program Rehabilitasi Sosial	774.245.000
1.5	e	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dan Perempuan	1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	590.894.200
			2. Program Perlindungan Perempuan	84.139.800
			3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga	115.096.750
			4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	93.535.000
			5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	179.088.000
			6. Program Perlindungan Khusus Anak	186.371.000
1.6	f	Peningkatan Pembangunan Pemuda	1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	222.787.300
			2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.435.946.900
			3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	20.000.000
1.7	g	Peningkatan Ibadah Sosial	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.241.247.200
			2. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.027.955.000
			3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	36.087.000
			4. Program Pengembangan Kebudayaan	350.360.000
			5. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	816.419.000
			6. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	501.339.300





**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

			7. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	103.727.200
			8. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	153.702.000
			9. Program Peningkatan Peran Partai	1.841.629.400
			Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
			10. Program Pengendalian Penduduk	486.948.150
			11. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.142.144.700
			12. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	124.975.000
2		Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan yang Bernuansa Religius		<b>249.705.612.154</b>
2.1	a	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	1. Program Penyelenggaraan Jalan	75.016.259.350
2.2	b	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	25.697.529.214
2.3	c	Peningkatan Pelayanan Perhubungan	1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	4.465.691.550
			2. Program Pengelolaan Pelayaran	252.715.000
2.4	d	Pembangunan dan Penataan Kawasan Permukiman dan Perkotaan yang Terintegrasi	1. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	25.315.140.000



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

			2. Program Pengembangan Perumahan	3.992.059.850
			3. Program Kawasan Permukiman	8.565.200.000
			4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	412.330.000
			5. Program Pengembangan Permukiman	18.138.335.000
			6. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	14.826.992.050
			7. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	269.649.900
			8. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	60.863.750
			9. Program Penataan Bangunan Gedung	16.840.452.000
			10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi	278.852.200
			11. Program Penatagunaan Tanah	882.230.000
			12. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	3.469.294.300
			13. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	72.045.000
			14. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	48.345.320
			15. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	26.970.200
2.5	e	Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum Aman	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	10.363.984.000
2.6	f	Peningkatan Pengelolaan Air Limbah	1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.920.284.260



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

			2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	11.852.435.000
			3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	9.509.215.000
			4. Program Pengelolaan Persampahan	9.923.173.560
2.7	g	Peningkatan Mitigasi Bencana dan Tanggap Darurat	1. Program Penanggulangan Bencana	1.197.147.650
			2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.466.058.000
			3. Program Penanganan Bencana	842.540.000
3		Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Maritim dan Agroindustri		<b>19.671.695.425</b>
3.1	a	Peningkatan Kontribusi Sektor Pariwisata	1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	2.801.745.050
			2. Program Pemasaran Pariwisata	1.826.388.400
			3. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	668.611.600
			4. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	60.090.000
3.2	b	Peningkatan Kontribusi Sub Sektor Pertanian,	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	190.523.400
		Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian		
			2. Program Pengawasan Keamanan Pangan	28.481.200
			3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.101.815.000



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

			4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.672.212.700
			5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	552.918.000
			6. Program Perizinan Usaha Pertanian	44.403.500
			7. Program Penyuluhan Pertanian	944.471.500
			8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	109.863.500
3.3	c	Peningkatan Kontribusi Sub Sektor Perikanan	1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	905.665.425
			2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	229.520.000
			3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	356.895.000
3.5	e	Peningkatan Pertumbuhan Investasi	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	41.716.000
			2. Program Promosi Penanaman Modal	197.578.000
			3. Program Pelayanan Penanaman Modal	271.205.00
			4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	149.980.000
3.6	f	Pembangunan dan Pengembangan Agroindustri	1. Program Pengembangan UMKM	37.900.400
			2. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	213.225.000
			3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	39.757.100
			4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.363.883.650



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

			5. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	146.645.000
			6. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	662.036.000
			7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	54.165.000
<b>4</b>	<b>Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam</b>			<b>3.563.176.400</b>
4.1	a	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	818.867.000
			2. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	15.514.000
4.2.	b	Pemulihan Lahan Berkelanjutan	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	158.509.800
			2. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	162.252.300
			3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	2.324.266.000
			4. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	25.341.500
			5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	41.103.700
			6. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	17.322.100
5	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan dan			<b>936.501.855.058</b>



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

	Optimalisasi Pelayanan Berbasis Nilai-Nilai Religius			
5.1	a	Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan	916.820.000
			2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	294.940.000
5.2	b	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.678.404.850
			2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.332.368.400
			4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	906.842.400
5.3	c	Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	118.223.467.877
			2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.429.842.100
5.4	d	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah	1. Program Kepegawaian Daerah	3.338.210.200
5.5	e	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Digital	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik	7.581.796.995
			2. Program Aplikasi Informatika	6.865.899.100
			3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	155.007.500
			4. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.483.149.000
			6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	522.664.800
			7. Program Pendaftaran Penduduk	671.634.300
			8. Program Pencatatan Sipil	227.768.000
			9. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100.535.400



**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)  
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2023**

			10. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.623.354.250
			11. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	904.944.700
			12. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	20.880.734.500
			13. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3.897.621.200
			14. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	730.206.373.436
			15. Program Perekonomian Dan Pembangunan	873.768.250
			16. Program Pengelolaan Profil Kependudukan	18.750.000
			17. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	706.893.650
5.6	f	Peningkatkan Status dan Kemajuan Kemandirian Desa	1. Program Penataan Desa	202.635.400
			2. Program Peningkatan Kerjasama Desa	84.183.000
			3. Program Administrasi Pemerintahan Desa	7.034.276.700
			4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.179.258.400
5.7	g	Peningkatkan Penyediaan Data dan Kualitas Data dan Informasi Dasar	1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	740.294.100
			2. Program Pengelolaan Arsip	246.086.000
			3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	105.000.000
5.8	h	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.439.237.700
<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>				<b>1.418.561.678.643</b>



**BAB VIII**

**PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan dan Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Batulicin,

PIMPINAN

BUPATI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH BUMBU

H. SUPIANSYAH. ZA, SE., MH.  
KETUA

dr.H.M. ZAIRULLAH AZHAR, M.Sc

SAID ISMAIL KHOLIL AL'IDRUS  
WAKIL KETUA

AGOES RAHKMADY, S.AP.  
WAKIL KETUA